



**BPK PERWAKILAN
PROVINSI BENGKULU**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2020



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	2
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.....	4
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	8
E. Anggaran Kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	12
B. Perencanaan Operasional BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.....	16
B. Realisasi Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.....	30
BAB IV PENUTUP	32
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menyelesaikan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2020.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu merupakan tolak ukur atas siklus implementasi akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2020 dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024. Laporan ini memuat pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sampai dengan Tahun 2020 sebagai bentuk pelaporan dan bahan evaluasi dalam upaya perbaikan manajemen kinerja di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Secara garis besar, pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menunjukkan perkembangan yang positif bila dibandingkan target yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dari skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2020 sebesar 97,72. Namun masih terdapat 5 (lima) indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu tahun 2020.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi media evaluasi dalam mengukur serta menilai kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dan menentukan langkah serta kebijakan selanjutnya untuk mendukung perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bengkulu, 09 Februari 2021
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
Plh. Kepala Perwakilan,



Muhammad Hidayat S.E.
NIP. 197109171996031005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah unit organisasi eselon I pada kementerian/lembaga dan unit kerja mandiri yang ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang salah satu diantaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang berada di bawah Auditorat Keuangan Negara (AKN) V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, kota/kabupaten di Provinsi Bengkulu, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN V.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyelenggarakan fungsi:

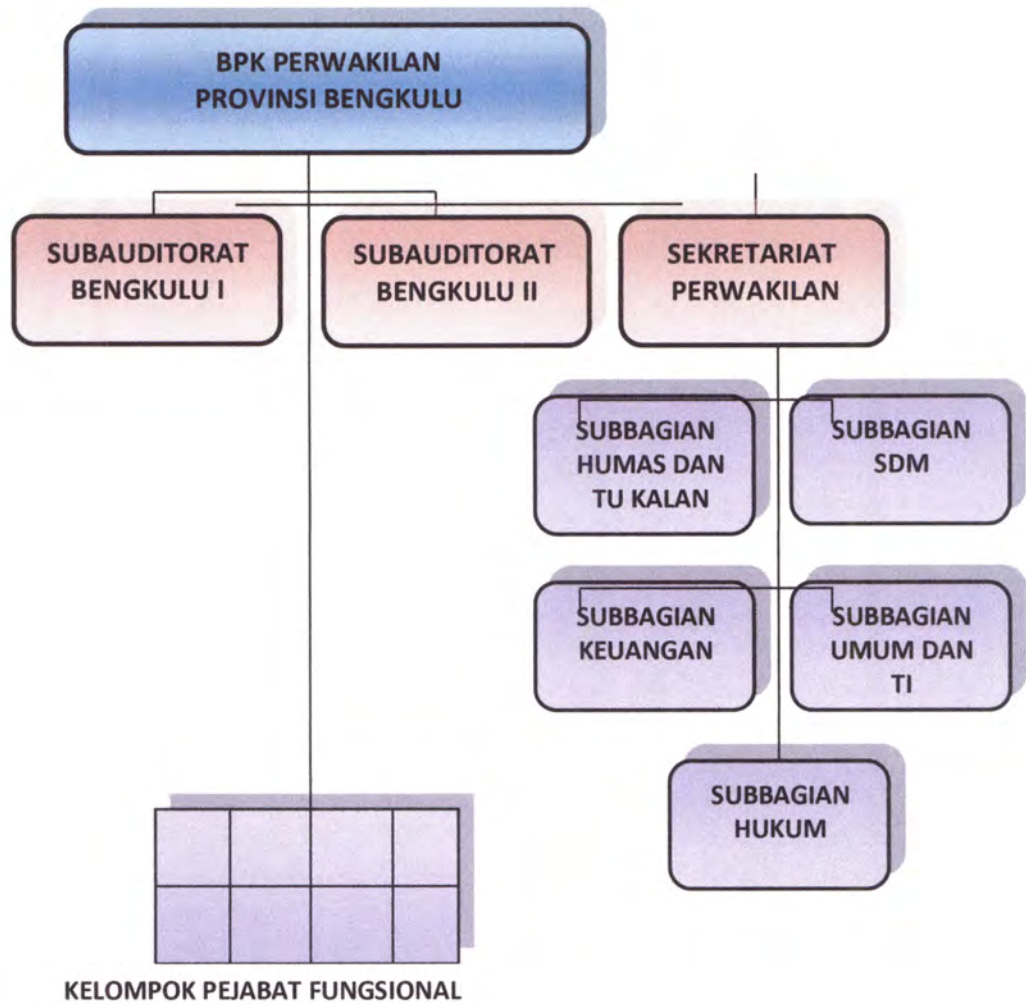
1. perumusan dan evaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
3. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
4. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK

- Perwakilan Provinsi Bengkulu yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
5. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
 6. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
 7. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
 8. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
 9. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
 10. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 11. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 12. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
 13. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 14. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
 15. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
 16. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
 17. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
 18. penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu; dan
 19. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen tersebut BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagai satuan kerja menyusun Laporan Kinerja.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

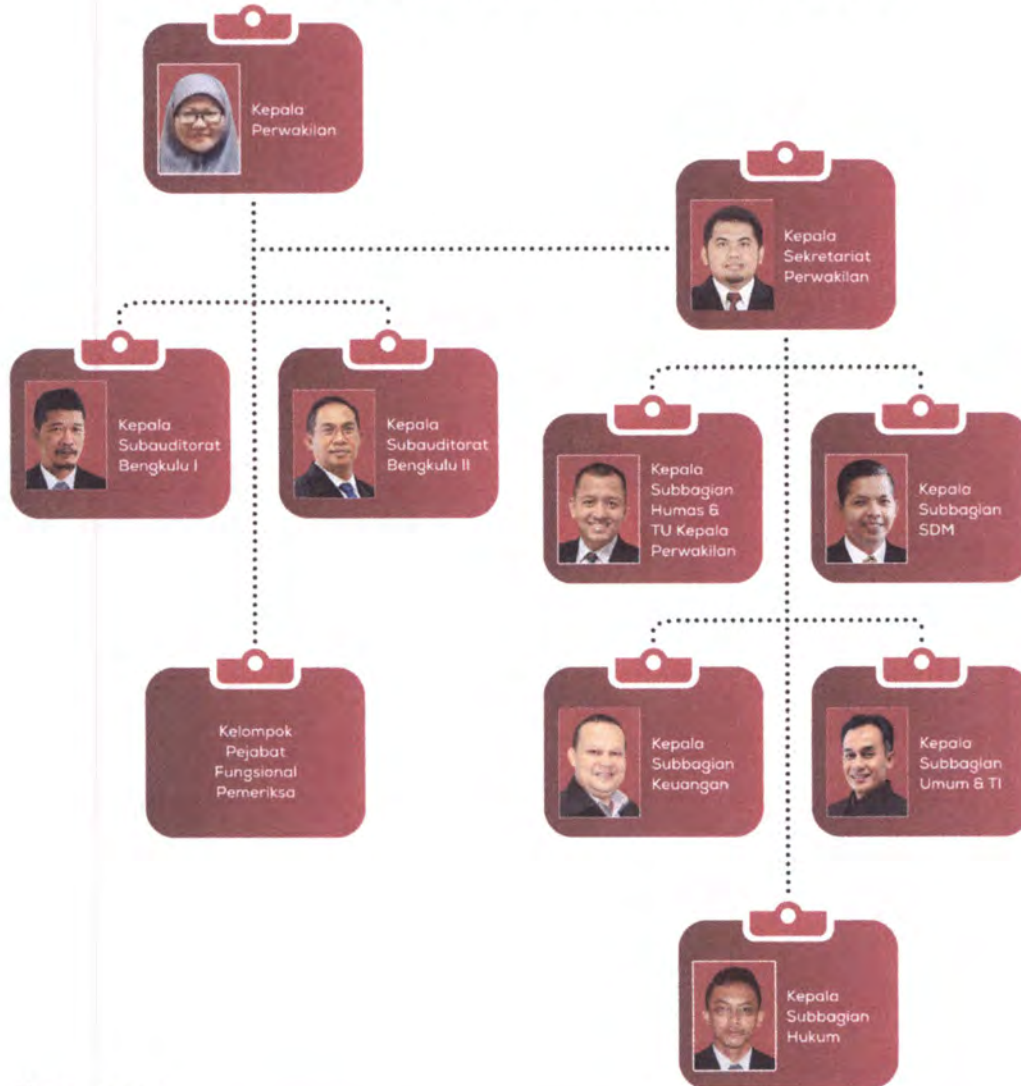
Bagan 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu



Sumber: Peraturan BPK No.1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK

Struktur Organisasi

BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU



Keterangan:

No.	Jabatan	Nama
1	Kepala Perwakilan	Najmatuzzahrah S.E., MBA., M.H., CA., CFE., CFA., CPA (Aust)., Ak., ACPA
2	Kepala Sekretariat Perwakilan	Muhammad Hidayat, S.E.
3	Kepala Subauditorat Bengkulu I	Ranni Agriadi, S.E., M.Si., Ak., CA
4	Kepala Subauditorat Bengkulu II	Indra Syahputra, S.E., M.M., Ak., CA.
5	Kasubag Humas dan TU Perwakilan	Rony Setyo Kurniawan, S.Sos.
6	Kasubag SDM	Adhy Cahyo Nugroho, S.E.
7	Kasubag Keuangan	Drs. Lui Hermawan, MAB.
8	Kasubag Umum dan TI	Iwan Sukma Permana, S.T., M.M.
9	Kasubag Hukum	Cosmas Andri Frans Katri Anggita, M.Si.

Sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V yang terdiri dari:

1. Subauditorat Bengkulu I

Subauditorat Bengkulu I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

2. Subauditorat Bengkulu II

Subauditorat Bengkulu II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;

- 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

3. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dan menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu; dan
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu; dan menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Sekretariat Perwakilan Provinsi Bengkulu terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

- b. Subbagian Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.
- c. Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu; dan
- e. Subbagian Hukum melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Sumber daya manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu posisi per 31 Desember 2020 berjumlah 73 orang meliputi 9 personil struktural (12%) yang terdiri dari 1 Kepala Perwakilan, 2 Kepala Subauditorat, 1 Kepala Sekretariat Perwakilan, dan 5 Kepala Subbagian, 15 personil di unit kerja penunjang pendukung (21%) dan 49 personil di unit kerja pemeriksaan/auditorat (67%). BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu juga memiliki pegawai tidak tetap (tenaga kontrak) sebanyak 22 orang, sehingga total seluruhnya 100 pegawai.

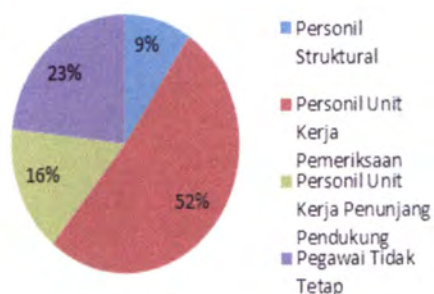
Berdasarkan jenjang pendidikan, SDM BPK Perwakilan Bengkulu (pegawai tetap) terdiri dari: sebanyak 16 orang berjenjang pendidikan S2 (22%), 49 orang berjenjang pendidikan S1 (67%), 1 orang berjenjang pendidikan D4 (1%), dan 5 orang berjenjang pendidikan D3 (7%), serta sisanya 2 orang berjenjang pendidikan setingkat SMU/SMK/SMEA (3%).

Berdasarkan jenis kelamin, SDM BPK Perwakilan Bengkulu (pegawai tetap) terdiri dari 40 orang pria (55%) dan 33 orang wanita (45%).

Terakhir, berdasarkan Jabatan Fungsional Pemeriksa dengan jumlah 49 orang terdiri atas 4 orang Pemeriksa Madya (8%), 8 Pemeriksa Muda (16%), dan 37 orang Pemeriksa Pertama (76%).

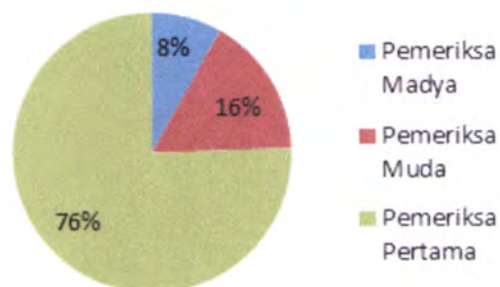
Tabel 1. dan Bagan 2. Jumlah Posisi Pegawai

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah	Persentase
1.	Personil Struktural	9	9%
2.	Personil Unit Kerja Pemeriksaan	49	52%
3.	Personil Unit Kerja Penunjang Pendukung	15	16%
4.	Pegawai Tidak Tetap	22	23%
	Jumlah	95	100%



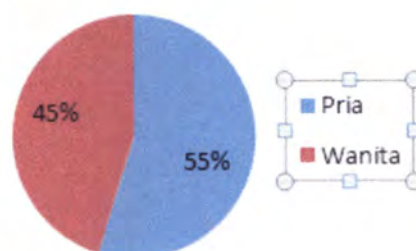
Tabel 2. dan Bagan 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Pemeriksa

No.	Uraian Jabatan	Jumlah	Persentase
1.	Pemeriksa Madya	4	8%
2.	Pemeriksa Muda	8	16%
3.	Pemeriksa Pertama	37	76%
	Jumlah	49	100%



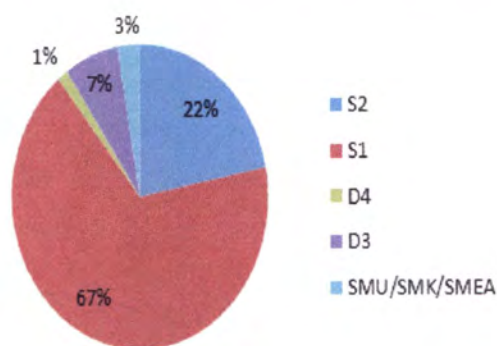
Tabel 3. dan Bagan 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender

No.	Uraian Gender	Jumlah	Persentase
1.	Pria	40	55%
2.	Wanita	33	44%
	Jumlah	73	100%



Tabel 4. dan Bagan 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Uraian Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	S2	16	22%
2.	S1	49	67%
3.	D4	1	1%
4.	D3	5	7%
5.	SMU/SMEA / SMK	2	3%
Jumlah		73	100%

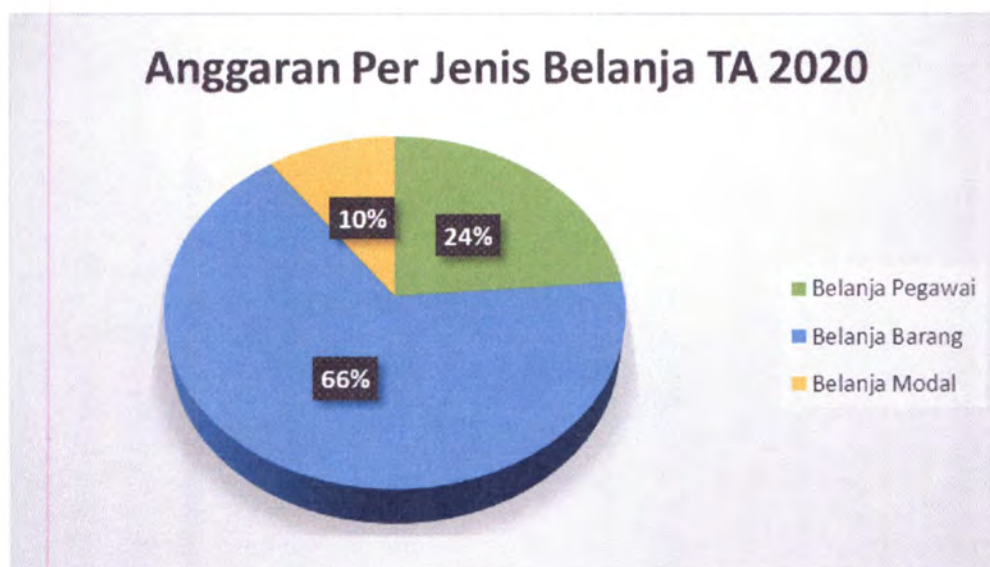


E. Anggaran Kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menganggarkan kegiatan tahun 2020 sebesar Rp18.645.131.000,00 . Rincian anggaran belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. dan Bagan 6. Anggaran Belanja Berdasarkan Jenis Belanja TA 2019

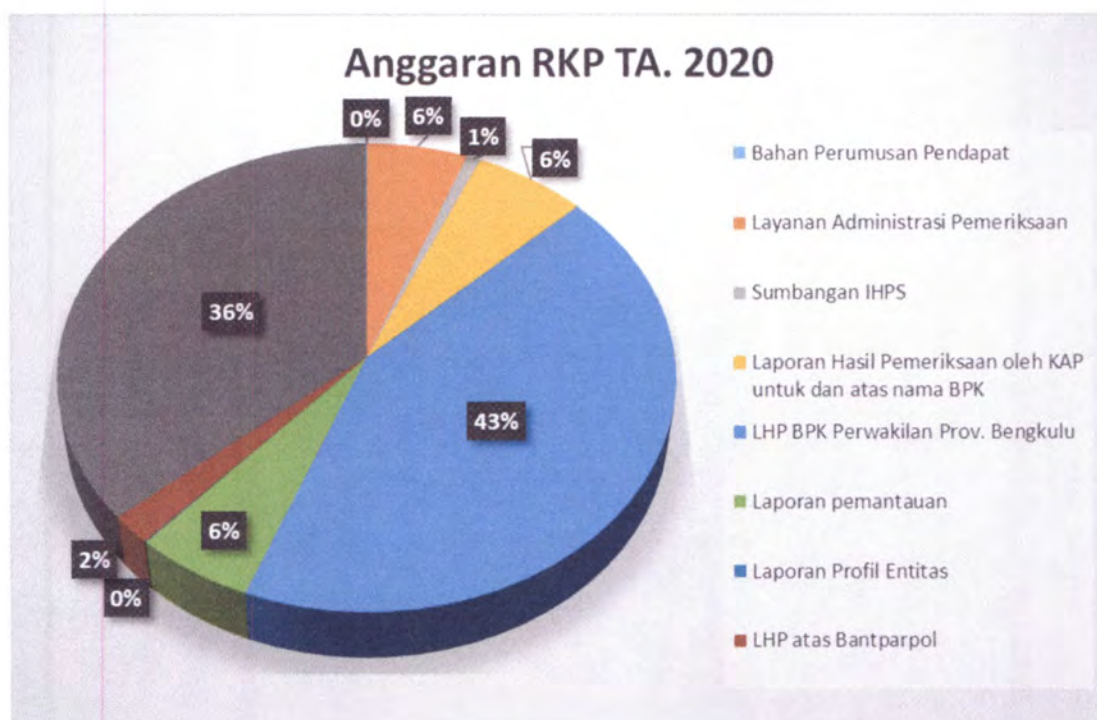
Kode	Uraian	Anggaran (Rupiah)
51	Belanja Pegawai	4.415.253.000
52	Belanja Barang	12.392.245.000
53	Belanja Modal	1.837.633.000
Jumlah		18.645.131.000,00



Adapaun rincian anggaran yang digunakan dalam mendukung kegiatan pemeriksaan berupa Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) Tahun Anggaran 2019 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 7. dan Bagas 7. Anggaran RKP Tahun Anggaran 2019

No	Kegiatan	Anggaran (Rupiah)
1	Bahan Perumusan Pendapat	4.307.000
2	Layanan Administrasi Pemeriksaan	406.847.000
3	Sumbangan IHPS	57.488.000
4	Laporan Hasil Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK	452.161.000
5	LHP BPK Perwakilan Prov. Bengkulu	3.057.379.000
6	Laporan pemantauan BPK Perwakilan Prov. Bengkulu	410.395.000
7	Laporan Profil Entitas	4.602.000
8	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Bengkulu	143.297.000
9	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	2.580.787.000
Jumlah		7.117.263.000



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

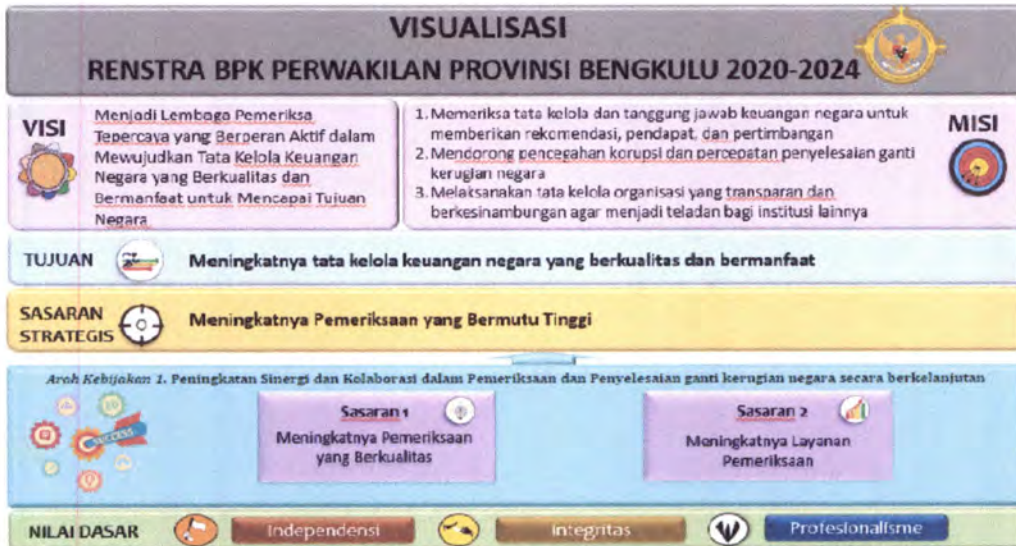
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menetapkan Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang berisikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan kelembagaan, serta target ukuran pencapaiannya yang sejalan dengan Renstra BPK Wide. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagai bagian dari BPK, mendukung visi, misi dan tujuan strategis serta melaksanakan nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut ini:

1. Visi BPK yaitu Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.
2. Misi BPK yaitu a) memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; b) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan c) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.
3. Nilai Dasar BPK, pencapaian cita-cita yang tertuang dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai sebagai berikut:
 - a. Integritas, BPK membangun nilai integritas mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
 - b. Independensi, BPK menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.
 - c. Profesionalisme, BPK membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.
4. Tujuan Strategis yaitu "Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat". Tujuan tersebut membawa semangat bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan. Hasil pemeriksaan BPK harus memberikan dampak peningkatan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.
5. Sasaran Strategis, dalam mendukung pencapaian visi dan tujuan strategis BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menetapkan sasaran strategis yaitu "Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi". Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis ini diperlukan penyempurnaan pada proses internal BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu terkait peningkatan kualitas pemeriksaan, dan

peningkatan layanan pemeriksaan. Penyempurnaan proses internal ini akan dapat terwujud melalui penguatan modal dasar organisasi meliputi peningkatan kualitas organisasi, peningkatan kompetensi pegawai, dan peningkatan kinerja anggaran di lingkungan BPK Provinsi Bengkulu. Keseluruhan strategi tersebut merupakan sasaran-sasaran strategis yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain dan terangkai dalam Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagaimana diilustrasikan seperti di bawah ini.

Bagan 8. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu



6. Arah Kebijakan dan Strategi Organisasi

Arah kebijakan adalah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga tujuan strategis tercapai. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mendukung arah kebijakan BPK dalam Renstra 2020-2024 sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Bagan 9. Framework Renstra BPK 2016 - 2020



Arah Kebijakan 1 : Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 5 – Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

Arah kebijakan 2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi.

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Target kinerja merupakan target pencapaian Sasaran Strategis Satker dalam peta strategis masing-masing satker selama lima tahun ke depan. Di samping itu dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan strategis dan sasaran strategis, Perwakilan Provinsi Bengkulu menetapkan ukuran keberhasilannya (IKU) sebagai berikut.

Tabel 8. Target Indikator Kinerja Perwakilan Provinsi Bengkulu

Tujuan Strategis	IKU	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat							
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%

3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
8	Hasil Evaluasi AKIP	A 86,00	A 87,00	A 88,00	A 89,00	A 90,05
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	(3,80)	(3,80)	(3,80)	(3,80)	(3,80)
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%

B. Perencanaan Operasional BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi Bengkulu selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Auditor Utama Keuangan Negara V). Berikut Sasaran Strategis, IKU dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2020:

Tabel 9. IKU BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Sasaran Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas pemeriksaan Meningkatnya layanan pemeriksaan 	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
		IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
		IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00
		IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A 86,00
		IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
		IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	(3,80)
		IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	83%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Capaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2020 berdasarkan hasil validasi sampai dengan Semester II Tahun 2020 yaitu sebesar 97,72. Skor kinerja Tahun 2019 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan pencapaian skor Tahun 2019 yaitu sebesar 100,36.

Capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor Tahun 2020	Target Tahun 2020	Capaian Tahun 2020
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	84,09	100%	84,09%
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100	100%	100%
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	90,29	75%	67,72%
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	101,14	100%	101,14%
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100	100%	100%
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100	100%	100%
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	90,8	5,00	4,54
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	105	A 86,00	AA 91,80
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	104,25	95%	99,04%
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100	100%	100%
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	97,11	(3,80)	(3,69)
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	94,87	100%	94,87%
IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	104,75	83%	91,14%

Berikut adalah pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2019:

IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Sampai dengan akhir Triwulan IV 2020 pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pada 11 entitas pemeriksaan LKPD TA 2019 daerah Tahun Anggaran 2019 telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan pemenuhan QA dan QC pada masing-masing pemeriksaan. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menyelesaikan 6

Pemeriksaan Kinerja dan 3 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Semester 2 tahun 2020. Realisasi IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan tahun 2020 baru mencapai 84,09% atau belum memenuhi target tahun 2020 sebesar 100%. IKU 1 ini menunjukkan ini sejauh mana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP), Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) serta hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama. Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan. Hasil Reviu Itama merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada Seluruh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan metode sampling. Indikator ini bertujuan untuk untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan.

Tabel 11 Realisasi IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahunan					Realisasi 2020
	2020	2021	2022	2023	2024	
IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	84,09%

Capaian IKU 1 tahun 2020 sebesar 84,09% dengan nilai 84,09 atau belum mencapai target yang diharapkan dengan uraian skor QA dan QC satuan kerja 100%, tingkat konsistensi atas LHP 54,55%, tingkat akurasi atas LHP 81,82%, dan hasil evaluasi Itama 100%.

Realisasi capaian IKU 1 belum dapat memenuhi target ini disebabkan oleh evaluasi Direktorat EPP atas LHP BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang mendapatkan nilai 68,19%. Bila dirinci lebih lanjut, kekurangan nilai tersebut disebabkan oleh penilaian tingkat konsistensi atas LHP BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang hanya mendapatkan nilai 54,55%. Atas kondisi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu berupaya untuk mendorong pegawai agar lebih memperhatikan kesalahan konsistensi dan akurasi terlebih kepada yang berdampak kepada nilai temuan maupun rekomendasi serta meningkatkan kinerja reviu konsep LHP secara redaksional dan berjenjang sebelum diterbitkannya LHP.

IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Tabel 12. Realisasi IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahunan					Realisasi 2020
	2020	2021	2022	2023	2024	
IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020, Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu adalah 100%. Realisasi tersebut telah memenuhi target 2020 yaitu 100%.

IKU 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Tabel 13. Realisasi IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahunan					Realisasi 2020
	2020	2021	2022	2023	2024	
IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	67,72%

Sampai dengan tahun 2020 terdapat 9.148 rekomendasi yang telah disampaikan ke Pemerintah Daerah. Dari jumlah tersebut terdapat 6.130 rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti (67,01%), 2.552 rekomendasi yang belum selesai atau masih dalam proses (27,90%), dan 401 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (4,38%), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 314 Rekapitulasi Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil

No.	Entitas	Reko- mendasi	Status Tindak Lanjut Rekomendasi							
			Telah Sesuai		Belum selesai atau masih dalam proses		Belum ditindaklanjuti		Tidak dapat ditindaklanjuti	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1.	Provinsi Bengkulu	1652	1038	62,83%	555	33,60%	55	3,33%	4	0,24%
2.	Kab. Kaur	566	388	68,55%	161	28,45%	16	2,83%	1	0,18%
3.	Kab. Mukomuko	598	400	66,89%	188	31,44%	9	1,51%	1	0,17%
4.	Kab. Bengkulu Selatan	750	433	57,73%	215	28,67%	87	11,60%	15	2,00%
5.	Kab. Bengkulu Utara	811	642	79,16%	166	20,47%	3	0,37%	0	0,00%
6.	Kab. Kepahiang	672	467	69,49%	191	28,42%	13	1,93%	1	0,15%
7.	Kab. Bengkulu Tengah	461	308	66,81%	105	22,78%	48	10,41%	0	0,00%
8.	Kab. Lebong	688	439	63,81%	209	30,38%	40	5,81%	0	0,00%
9.	Kab. Rejang Lebong	725	564	77,79%	150	20,69%	8	1,10%	3	0,41%
10.	Kab. Seluma	795	420	52,83%	277	34,84%	90	11,32%	8	1,01%
11.	Kota Bengkulu	1430	1031	72,10%	335	23,43%	32	2,24%	32	2,24%
	Jumlah	9.148	6.130	67,01%	2.552	27,90%	401	4,38%	65	0,71%

Capaian IKU 3. tahun 2020 sebesar 67,72% dengan nilai 90,29 atau belum mencapai target yang diharapkan disebabkan sebagian besar entitas telah menindaklanjuti rekomendasi, namun rekomendasi yang ditindaklanjuti masih belum sesuai atau dalam proses tindak lanjut. Selain itu, terdapat kecenderungan kurangnya kesadaran entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, khususnya kurang proaktifnya entitas dalam mengupayakan percepatan penyelesaian tindak lanjut.

Dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi dalam hasil pemeriksaannya, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu secara berkala telah melakukan pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dengan seluruh pihak Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penyelesaian tindak lanjut, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah mengimplementasikan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK (SIPTL) sebagai sarana penginputan dan pemvalidasian bahan tindak lanjut berbasis TI.

Sebagai wujud komitmen untuk mendorong percepatan penyelesaian TLRHP, pada tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menyelenggarakan forum pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dengan pihak Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 3 Juli 2020 dan *Focus Group Discussion* (FGD) Eksekutif, Pemantauan TLRHP dan Sosialisasi SIPTL pada tanggal 25 s.d. 27 November 2020. Forum tersebut diikuti oleh para Kepala Daerah, Kepala Inspektorat dan pejabat terkait dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu. Pada forum tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu juga melakukan pendampingan bagi entitas yang menghadapi kendala dalam memanfaatkan aplikasi SIPTL.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyediakan ruang *Helpdesk* Pemantauan Tindak Lanjut, dengan tujuan untuk membantu entitas dalam melakukan penginputan pada Aplikasi SIPTL dan membuka forum konsultasi bila menghadapi kendala dalam melaksanakan tindak lanjut rekomendasi BPK.

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 3., pada tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp143.465.000,00 dengan realisasi sebesar Rp97.121.150,00 atau 67,69%.



Gambar 2. Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan



Gambar 3. Ruang Helpdesk Pemantauan Tindak Lanjut

IKU4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

IKU ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Tabel 14. Realisasi IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahunan					Realisasi 2020
		2020	2021	2022	2023	2024	
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada periode Semester II Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melaksanakan 7 Pemeriksaan Tematik Nasional dengan rincian sebagai berikut.

1. Pemeriksaan Kinerja SPBE Kabupaten Kepahiang;
2. Pemeriksaan Kinerja SPBE Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan BPD Bengkulu;
4. Pemeriksaan Kinerja Penanganan Pandemi COVID-19 Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Pemeriksaan PDTT Penanganan Pandemi COVID-19 Provinsi Bengkulu;
6. Pemeriksaan PDTT Penanganan Pandemi COVID-19 Kota Bengkulu; dan
7. Pemeriksaan PDTT Penanganan Pandemi COVID-19 Kabupaten Rejang Lebong.

Realisasi ini sesuai dengan target Pemeriksaan tematik nasional pada RKP Tahun 2020 yaitu 7 pemeriksaan. Sehingga realisasi tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu adalah 100%. Realisasi tersebut telah memenuhi target 2020 yaitu 100%.



Gambar 4. Penyerahan LHP Kinerja TA 2019 secara virtual

IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Tabel 15. Realisasi IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahunan					Realisasi 2020
		2020	2021	2022	2023	2024	
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Belum terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2020, sehingga tingkat pemenuhan pemeriksaan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 masih sebesar 100%, sesuai dengan target tahunan.

IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

IKU ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Tabel 16. Realisasi IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahunan					Realisasi 2020
		2020	2021	2022	2023	2024	
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada periode Semester II Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melaksanakan 2 Pemeriksaan Tematik Lokal dengan rincian yaitu Pemeriksaan Kinerja Manajemen Aset Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kinerja Manajemen Aset Kabupaten Seluma.

Realisasi ini sesuai dengan target Pemeriksaan tematik nasional pada RKP Tahun 2020 yaitu 2 pemeriksaan. Sehingga realisasi tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu adalah 100%. Realisasi tersebut telah memenuhi target 2020 yaitu 100%.



Gambar 5. Penyerahan LHP Kinerja Tematik Lokal Tahun 2019 secara virtual

IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Skala hasil survei sebagaimana berikut.

- a) 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- b) 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- c) 3,00 - 3,99 = memuaskan
- d) 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK.

Tabel 17. Realisasi IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahunan					Realisasi 2020
		2020	2021	2022	2023	2024	
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,54

Survei Pengukuran Indikator yang mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar bagi pegawai BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menunjukkan skor sebesar 4,54. Realisasi ini belum sesuai dengan target Tahun 2020 yaitu 5,00.

IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut:

- AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK.

Tabel 18. Realisasi IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahunan					Realisasi 2020
		2020	2021	2022	2023	2024	
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A	A	A	A	A	AA
		86,00	87,00	88,00	89,00	90,05	91,80

Pada tahun 2020, Perwakilan Provinsi Bengkulu telah memperoleh penilaian dari Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2019 berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama Nomor 376/ND/XI/09/2020 dengan nilai sebesar 91,80 atau dengan predikat "AA" (Sangat Memuaskan). Dengan demikian nilai capaian IKU 8 tahun 2020 adalah sebesar 105.

IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (email, e-Drive, Portal), layanan aplikasi SISDM dan layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, e-Audit, SIPTL). Untuk mendorong IT culture di lingkungan BPK, seluruh satker diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal. IKU ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan TIK dalam rangka mendorong IT culture di BPK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Tabel 19. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahunan					Realisasi 2020
		2020	2021	2022	2023	2024	
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%	99,04%

Pada tahun 2020, Perwakilan Provinsi Bengkulu memperoleh nilai tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dari Biro TI dengan rincian sebagai berikut (1) Layanan dasar: Email, e-Drive, dan Portal sebesar 100%, (2) Layanan aplikasi umum: SISDM sebesar 96,15%, (3) Layanan pemeriksaan: SMP, e-Audit dan SIPTL sebesar 100%, dan (4) Layanan Manajemen Pengetahuan sebesar 100% atau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 20. Hasil Evaluasi tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Uraian Layanan	Rincian layanan TIK yang dimanfaatkan	Nilai Pemanfaatan TIK	Nilai Rata-rata Pemanfaatan TIK
Layanan Dasar	Email	100,00%	100,00%
	e-Drive	100,00%	
	Portal	100,00%	
Layanan Aplikasi Kelembagaan	SISDM	96,15%	96,15%
Layanan Aplikasi Pemeriksaan	SMP	100,00%	100,00%
	e-Audit	100,00%	
	SIPTL	100,00%	
Layanan Manajemen Pengetahuan		100,00%	100,00%
Rata-Rata Pemanfaatan TIK			99,04%

Dari hasil evaluasi Biro TI di atas diketahui bahwa Perwakilan Provinsi Bengkulu telah optimal dalam pemanfaatan layanan aplikasi SISDM, SMP dan Portal e-Audit. Sebagian besar pemanfaatan portal e-Audit digunakan untuk mengecek manifest dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara pada saat pemeriksaan LKPD dan PDTT. Sedangkan aplikasi SMP dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendokumentasikan informasi yang terkait tahapan-tahapan dalam kegiatan pemeriksaan. Dengan demikian nilai IKU 9 adalah sebesar 104,25.

IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (best practice). Best practice (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP. Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metodemetode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Tabel 21. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahunan					Realisasi 2020
	2020	2021	2022	2023	2024	
IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Jumlah *Best-Practice* yang disusun tahun 2020 adalah sebanyak 1 (satu) atau sama dengan jumlah usulan Best Practice yang direncanakan untuk disusun yaitu sebanyak 1 (satu). *Best-practice* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi *best-practice*.

Pada tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menyampaikan usulan *Best Practice* yang disampaikan kepada Direktorat PSMK yaitu usulan *Best Practice* terkait “Satgas Pemantauan Kepatuhan Kode Etik Pemeriksa dalam Pelaksanaan Pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu (*Task Force AJIP*)”.

Usulan *Best Practice* tersebut telah mendapat penetapan Hasil Penilaian Usulan *Best Practice* dari Direktorat PSMK melalui Nota Dinas Kepala Direktorat PSMK Nomor 660/ND/XII.1/12/2020. Ditetapkan dalam nota dinas tersebut bahwa usulan *Best Practice* tersebut dapat diakui sebagai capaian Indikator Kinerja “Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan” Tahun 2020 dan dapat dipertimbangkan sebagai *Innovative Practice*. Dengan demikian, realisasi tingkat penerapan manajemen pengetahuan pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu adalah 100%. Realisasi tersebut telah memenuhi target 2020 yaitu 100% dan nilai IKU 10 tahun 2020 adalah sebesar 100,00.





Gambar 7. Pelaksanaan Kegiatan KTF Perwakilan Tahun 2020

IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

IKU ini mengukur tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan. Skala hasil survei sebagaimana berikut.

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Tabel 22. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahunan					Realisasi 2020
	2020	2021	2022	2023	2024	
IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,69

Survei Pengukuran Indikator yang mengukur tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mendapatkan skor sebesar 3,69. Realisasi ini lebih rendah atau belum memenuhi dari target Tahun 2020 yaitu 3,80.

IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan diukur melalui tercapainya Persentase pemenuhan diklat oleh Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa (min. 40 JP) dan Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) dengan minimal jam diklat 20 JP.

Tabel 23. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahunan					Realisasi 2020
		2020	2021	2022	2023	2024	
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	94,87%

Pada Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menyelenggarakan Diklat LKPD berbasis Akrual sebagai persiapan dan sarana memperbaharui wawasan pemeriksa sebelum dilaksanakannya pemeriksaan LKPD. Sampai dengan batas *cut off* pelaporan IKU, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 74 dari 78 pegawai Bengkulu telah memenuhi jam diklat sehingga persentase pencapaian pemenuhan jam diklat pegawai sebagai kegiatan pengembangan kompetensi pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sebesar 94,78% atau belum memenuhi target yang telah ditentukan pada tahun 2020 yaitu sebesar 100%.



Gambar 4. Pelaksanaan Diklat LKPD berbasis Akrual Tahun 2020

IKU 13. Tingkat Kinerja Anggaran

IKU ini mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu:

- 1) Penyerapan anggaran
- 2) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
- 3) Pencapaian keluaran
- 4) Efisiensi

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran. Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode. Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan diukur melalui satu IKU, yaitu IKU 13 terkait Tingkat Kinerja anggaran di Lingkungan Perwakilan dengan target tahun 2020 sebesar 83%.

Tabel 24. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahunan					Realisasi 2020
		2020	2021	2022	2023	2024	
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	91,14%

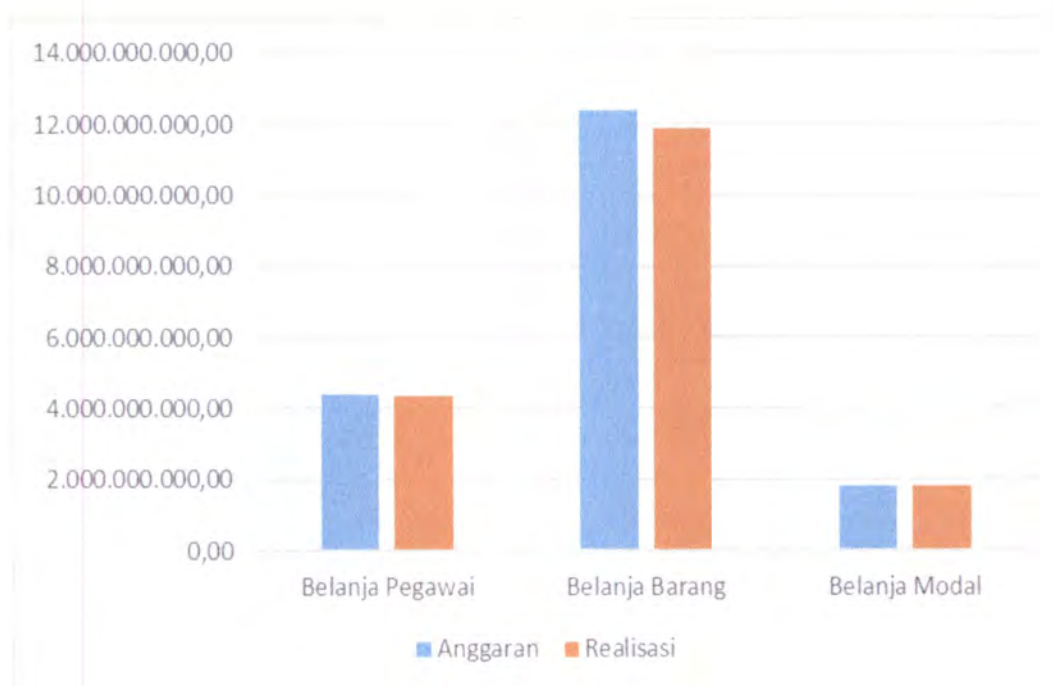
Realisasi IKU 13 terkait tingkat kinerja anggaran di Lingkungan Perwakilan tahun 2019 telah mencapai 91,14% atau melampaui target tahun 2020 sebesar 83,00% dengan rincian Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebesar 86,00% dan Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) sebesar 98,84%. Pada tahun 2020, tingkat kinerja implementasi anggaran adalah sebesar 91,14%. Dengan demikian nilai IKU 13 Tahun 2020 adalah sebesar 104,75.

B. Realisasi Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Realisasi Belanja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu tahun 2020 adalah sebesar Rp18.069.070.338,00 atau 96,91% dari anggaran belanja sebesar Rp18.645.131.000,00. Rincian anggaran belanja TA 2020 dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 25 dan Bagan 10. Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2020

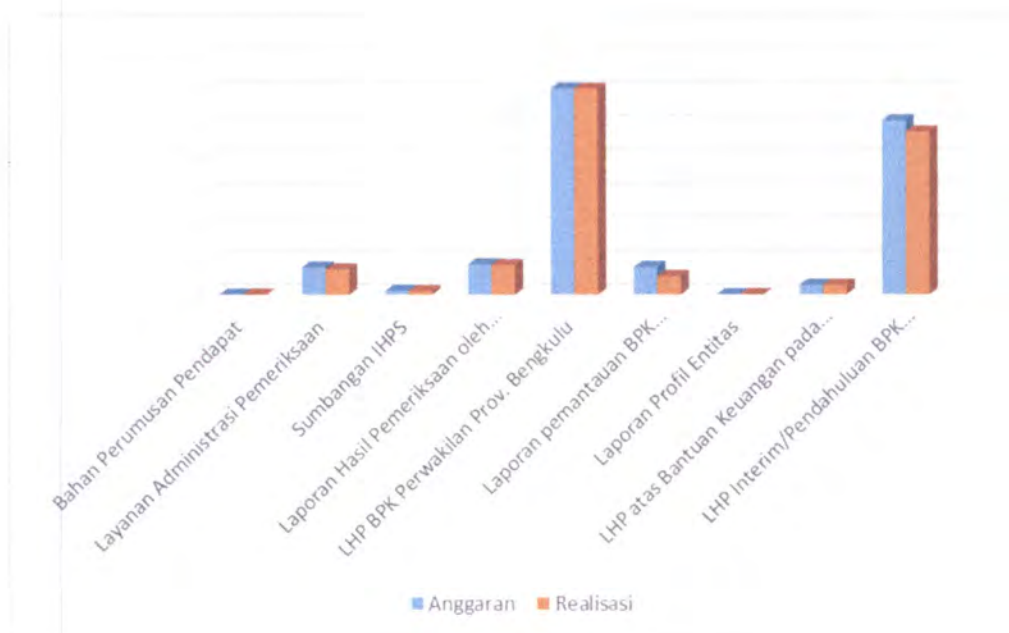
Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2019		
		Anggaran	Realisasi	%
51	Belanja Pegawai	4.415.253.000,00	4.359.836.080,00	98,74
52	Belanja Barang	12.392.245.000,00	11.895.301.257,00	95,99
53	Belanja Modal	1.837.633.000,00	1.835.157.500,00	99,87
	Pengembalian Belanja	-	21.224.499,00	0,00
		18.645.131.000,00	18.069.070.338,00	96,91



Adapaun realisasi belanja yang digunakan dalam kegiatan pemeriksaan berupa Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) Tahun Anggaran 202- diuraikan sebagai berikut.

Tabel 26 dan Bagan 11. Anggaran dan Realisasi Belanja RKP Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Bahan Perumusan Pendapat	4.307.000	4.260.820	98,92
2	Layanan Administrasi Pemeriksaan	406.847.000	378.562.520	93,04
3	Sumbangan IHPS	57.488.000	54.575.382	94,93
4	Laporan Hasil Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK	452.161.000	441.636.600	97,67
5	LHP BPK Perwakilan Prov. Bengkulu	3.057.379.000	3.051.306.695	99,80
6	Laporan pemantauan BPK Perwakilan Prov. Bengkulu	410.395.000	273.996.800	66,67
7	Laporan Profil Entitas	4.602.000	4.602.000	100,00
8	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Bengkulu	143.297.000	142.403.300	99,37
9	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	2.580.787.000	2.412.580.254	93,48
	Jumlah	7.117.263.000	6.763.924.371	95,04



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu merupakan sumbangan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 pada AKN V sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja, baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Secara umum, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah mencapai skor kinerja Tahun 2020 yaitu sebesar 97,72 dari skor maksimal 105. Ketidaktercapaian ini merupakan implikasi dari beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:

1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
2. IKU 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
3. IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
4. IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; dan
5. IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi.

Permasalahan dan kendala yang menjadi penyebab tidak tercapainya beberapa target IKU BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, antara lain :

1. Secara keseluruhan, Pemerintah Daerah telah berupaya menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK. Disamping itu, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah berupaya melakukan langkah percepatan penyelesaian tindak hasil pemeriksaan BPK. Namun, rekomendasi yang ditindaklanjuti sebagian besar masih belum sesuai atau dalam proses tindak lanjut sehingga tidak dapat diperhitungkan ke dalam capaian IKU 3. Selain itu, terdapat kecenderungan kurangnya kesadaran entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, khususnya kurang proaktifnya entitas dalam mengupayakan percepatan penyelesaian tindak lanjut; dan
2. Keterbatasan jumlah pemeriksa di perwakilan menyebabkan jadwal diklat berbarengan dengan tugas pemeriksaan dilaksanakan baik oleh pemeriksa maupun non pemeriksa yang diperbantukan dalam pemeriksaan.

Upaya-upaya yang akan dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam rangka pemenuhan target tahun berikutnya diantaranya dengan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dalam rangka perbaikan pengelolaan kinerja, menyediakan ruang *Helpdesk* Pemantaun Tindak Lanjut dengan tujuan untuk membantu entitas dalam melakukan penginputan pada Aplikasi SIPTL dan membuka forum konsultasi bila menghadapi kendala dalam melaksanakan tindak lanjut rekomendasi BPK. Selain itu, dilakukan upaya sosialisasi kepada pegawai untuk meningkatkan pemahaman terhadap visi misi dan nilai dasar BPK serta meningkatkan standar jam pelatihan bagi pemeriksa dan non pemeriksa. Selain itu, dalam rangka meningkatkan indeks implementasi nilai dasar BPK, BPK Perwakilan

Bengkulu juga mengusulkan *best practice* terkait nilai integritas dengan dibentuknya Satgas Pemantauan Kepatuhan Kode Etik Pemeriksa dalam Pelaksanaan Pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu (*Task Force AJIP*).

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Tahun Anggaran : Tahun 2020

	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor	Target	Capaian
		Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2020
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	84,09	100%	84,09%
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100	100%	100%
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	90,29	75%	67,72%
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	101,14	100%	101,14%
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100	100%	100%
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100	100%	100%
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	90,8	5,00	4,54
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	105	A 86,00	AA 91,80
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	104,25	95%	99,04%
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100	100%	100%
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	97,11	(3,80)	(3,69)
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	94,87	100%	94,87%
IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	104,75	83%	91,14%